

# EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

**Ahmad Rasyifin<sup>1</sup>, Rahmatul Huda<sup>2</sup>, Parman Komarudin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad al-Banjari, 19500048

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad al-Banjari, 1113089201

<sup>3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad al-Banjari, 1103058201

Email: [arasyifin@gmail.com](mailto:arasyifin@gmail.com)

## **Abstrak**

Faktor yang menjadi latarbelakang penulis dalam mengangkat permasalahan ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dari sudut pandang sosiologi hukum khususnya teori efektivitas hukum yang mencakup faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis dapatkan berasal dari hasil observasi lapangan, melakukan wawancara dengan instansi terkait dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan judul penelitian penulis. Data yang di dapatkan kemudian di rangkum, dikumpulkan dan dipilih data yang tidak diperlukan, lalu data disajikan agar memudahkan mencari pokok-pokok temuan sehingga mudah dipahami dan peneliti dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya data yang sudah diolah dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah masih belum efektif dalam mengatur permasalahan pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Handil Bakti, yang disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari tidak adanya peraturan kepala daerah yang menjelaskan lebih detil perda tersebut, penegak hukum yang belum maksimal dalam melaksanakan amanat perda, sarana atau fasilitas yang belum memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Sosiologi Hukum.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- DPRD Kabupaten Barito Kuala. *Perda Kabupaten Barito Kuala No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2018.
- Dwi Retno Widati. "Pembentukan Desa/Kelurahan sadar Hukum sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat." *Jurnal Hukum dan HAM Wiracana* 2 (1 Maret 2023).
- Faidol Mubarak. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Gita Fitriyani. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Isra Ruspandary, Sekretaris Lurah Handil Bakti, 17 April 2022.
- Lisa Hadiyati, KASI penyidikan dan penindakan Satpol PP Barito Kuala, 8 Mei 2022.
- Mety Monita, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, 8 Mei 2022.
- Miftahur Rizqy. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)," *Legitimasi*, IV (2017).
- Noorhidayah. "Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya." Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, 2018.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional." *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Diakses 20 Februari 2023. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sylvia Ariani. "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah." *Bagian Hukum & Perundang-Undangan Kota Banjarbaru*, *Badamai Law Journal*, 2 (2017).
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.